

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas yang terjadi pada Pemilihan Umum. Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan meduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum. Pemilu merupakan pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat.

Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.¹ Selain dari definisi di atas Morrisan mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.² Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum.

¹ <http://eprints.umpo.ac.id/5513/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 27 Juni 2023

² Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) Hal. 45

Batas waktu untuk mendapatkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun. Dalam partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di Indonesia. Selain itu partisipasi politik adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya.³ Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena didalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan Presiden sampai dengan pemilihan kepala desa dilakukan pemilihan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses tersebut.

Partisipasi politik yang merupakan wujud kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan system demokrasi. Tingginya partisipasi pemilih dapat dibaca sebagai penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di Indonesia dan harapan bagi terwujudnya kemajuan negara, sementara rendahnya partisipasi pemilih dapat menunjukkan bentuk ketidakpercayaan serta perilaku apatis masyarakat terhadap proses politik serta kehidupan bernegara. Lebih jauh lagi, tingkat partisipasi pemilih juga dapat dijadikan barometer untuk mengukur beberapa hal, seperti menilai keberhasilan suatu pemilihan, menilai kesadaran politik rakyat atau masyarakat, atau mengukur

³ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta : PT. Eresco, 1981) Hal. 23

legitimasi peserta pemilihan yang menang.⁴ Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden dan wakilnya merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dari kedaulatan rakyat.⁵

Kurangnya kesadaran partisipasi pada pemilihan langsung merupakan suatu proses yang dinilai kurang efektif dalam menghasilkan pemimpin. Akan tetapi, dilain pihak apa yang dihasilkan dalam pemilihan langsung hanya melahirkan kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kekecewaan sebagai masyarakat tersebut akhirnya menimbulkan berbagai macam reaksi, salah satunya golput. Golput adalah kelompok yang tidak mau menggunakan hak suaranya.⁶

Pemilihan langsung memberikan suatu hal yang baru dimana masyarakat akan lebih merasakan kebebasan demokrasi demi tercapainya masyarakat yang demokratis, untuk menuju masyarakat yang demokratis perlu diketahui bagaimana masyarakat ikut aktif dalam memberikan atau menyalurkan aspirasi politiknya.

⁴ <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>

⁵ Soekarno, Hatta dalam skripsi perilaku memilih pemilihan umum legislative 2009 di Kabupaten Sinjai. Hal . 5

⁶ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal. 208

Kegiatan politik masyarakat merupakan suatu proses kesadaran politik, dimana cara menyampaikannya berbeda-beda. Ada yang ikut berkampanye langsung mendukung sang calon pemimpin dan ada juga yang langsung memberikan hak suaranya pada hari pemilihan. Kesadaran politik tentunya sangat dibutuhkan dalam proses demokrasi Indonesia, terutama dalam proses memilih pemimpin. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran politik tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi dalam membangun kesadaran politik masyarakat, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Hal ini disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang boleh dikatakan sangat bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung oleh mereka sendiri dan memberikan keuntungan kepada mereka.⁷

Secara umum pemilu disambut gembira oleh masyarakat Indonesia, karena dalam pemilu tersebut, masyarakat dapat mengekspresikan kebutuhannya akan seorang pemimpin atau wakil yang mereka inginkan. Oleh karena itu, mereka bahu-membahu dalam mendukung dan mensukseskan calon pemimpin atau wakilnya agar terpilih. Akan tetapi diantara sebagian masyarakat ada juga yang acuh tak acuh terhadap proses pemilihan itu, bahkan tidak turut serta dalam pemilu yang diselenggarakan mereka ini dikenal dengan istilah golongan putih (Golput).

Dalam pemilu juga sering terjadi politisasi birokrasi dimana telah menjadi bagian dari strategi kemenangan yang senantiasa digunakan para elit politik dan

⁷ Khairudin H, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992). Hal. 126

birokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Praktik ini berkembang pesat semenjak pergeseran demokrasi ke arah lokal dengan keikutsertaan pertahanan pada bursa pencalonan gubernur, bupati dan walikota. Alhasil birokrasi sebagai mesin politik dapat mengantarkan kemenangan pertahanan pada perebutan kekuasaan di periode kedua. Disamping itu, dalam perjalanan sejarah demokrasi yang pada awalnya ditolak karena elitis, kemudian berproses dengan legitimasi moral dan nilai keagamaan sampai demokrasi kotemporer yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi luar masyarakat. Legitimasi dan legalitas politik merupakan dua soal penting karena setiap kemenangan yang diraih seseorang dalam kontestasi politik tentu didasari pada pengakuan akan kerja nyata dan integritas diri orang tersebut di mata masyarakat.⁸ Selanjutnya, jika telah mengikuti beragam aturan dalam proses pemilihan, mereka yang menang tentu mendapatkan legalitas politik. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki usia dewasa dalam politik dan demokrasi. Riak kecurangan dan konflik nyaris tidak terjadi.

Kedewasaan politik benar-benar ditunjukkan para calon pemimpin. Harapan akan munculnya negarawan yang datang dari pemimpin lokal bisa saja terwujud. Oleh karena itu, momen pemilihan menjadi amat penting bagi masyarakat. Bukan saja karena setelah proses itu pemimpin yang terpilih harus mengisi kursi kepemimpinan yang telah dan akan berakhir pada daerahnya. Penting dan terutama urgen karena proses politik kemarin, menjadi waktu ketika terjadi pertarungan legalitas hukum dan politik di satu sisi dengan legitimasi sosial di sisi yang lain. Keengganan menyelaraskan dua aspek itu akan berpotensi pada

⁸ <https://repository.unikom.ac.id/34659/1/PERTEMUAN%20IX.doc>

munculnya pemimpin yang tanpa legalitas sekaligus rendah dari aspek legitimasi sosial. Hal ini berimplikasi pada tumbuhnya bibit otoritarianisme di dunia politik Indonesia. Fakta menunjukkan, di beberapa daerah, masih saja terjadi banyak sekali pelanggaran pemilu dalam fase kampanye kemarin. Hal ini harus menjadi perhatian pihak penyelenggara agar segera mengambil langkah tegas. Ketegasan amat diperlukan terutama untuk menyelaraskan dua aspek di atas tadi.

Strategi politisasi birokrasi tidak terlepas dari intervensi politik ke dalam birokrasi pemerintah daerah, kewenangan sebagai kepala daerah (petahanan) dan pimpinan SKPD (elite birokrasi) dengan mudah menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan program pemerintah untuk kepentingan politik. Intervensi seperti ini kemudian berdampak pada netralitas birokrasi selama pilkada, ASN yang seharusnya bersikap profesional, independen, dan menjunjung tinggi nilai etika harus bergerang menyokong kepentingan elite. Seperti yang diungkapkan Thoha, birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan politik.⁹ Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Keterlibatan birokrasi dalam politik, atau terjadinya politisasi birokrasi seperti yang diungkapkan Yusuf dan Wibawa (dalam Kumorotomo dan Widyaningrum) bahwa, politisasi birokrasi terjadi karena pegawai daerah cenderung dikoptasi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di daerah. Birokrasi mencari dukungan politik untuk memperoleh atau mempertahankan jabatannya.

Pada kasus tingginya partisipasi merupakan keberhasilan pencapaian suatu

⁹ <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/download/1242/965>

elit untuk mempertahankan kekuasaanya, seperti contoh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan suatu kabupaten yang tingkat partisipasinya tergolong tinggi yang ada di Provinsi Jambi, akan tetapi tingginya partisipasi di kabupaten tanjung jabung timur tidak sesuai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun infrastrukturnya, karena adanya dugaan politisasi birokrasi yang mengintervensi dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga tingkat partisipasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergolong tinggi di Provinsi Jambi.

Fenomena adanya politisasi birokrasi yang terjadi di Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dalam kemenangan Bupati Tanjung Jabung Timur yaitu Romi Haryanto dimana pada periode kedua petahana memilih maju melalui jalur independen dan mendapatkan kemenangan telak sebesar 76,8%. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya intervensi atau tekanan politik yang dilakukan terhadap Kepala Desa untuk memenangkan salah satu calon pasangan bupati tersebut. Disamping itu, adanya politik balas budi yang dilakukan oleh Romi Haryanto disaat pencalonan Kepala Desa dimana Romi Haryanto memberikan bantuan berupa dana ataupun sesuai permintaan calon Kepala Desa tersebut. Sehingga Kepala Desa itu dapat menang pada pemilihan Kepala Desa dan menyebabkan adanya keterkaitan politik balas budi yang dilakukan Kepala Desa terhadap pencalonan independen yang dilakukan oleh Romi Haryanto.

Data tingginya pemilihan umum tahun 2019 di Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Data Pemilih pada Pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	Jumlah Data Pemilih	Jumlah Yang Melaksanakan Hak Pilih	Persentase Golput
1.	BERBAK	1. RANTAU MAKMUR	10	2,114	1,756	16,93%
		2. RANTAU RASAU	10	2,169	1,773	18,26%
		3. RAWA SARI	4	570	488	14,34%
		4. SIMPANG	7	1,592	1,263	20,67%
		5. SUNGAI RAMBUT	2	427	348	18,50%
		6. TELAGA LIMO	3	762	613	19,55%
		Total:	36	7,324	6,241	14,79%
2.	DENDANG	1. CATUR RAHAYU	7	1,731	1,577	8,87%
		2. JATI MULYO	2	519	477	8,09%
		3. KOTO KANDIS	7	1,459	1,303	10,69%
		4. KOTO KANDIS DENDANG	3	657	586	10,80%
		5. KUALA DENDANG	6	1,330	1,067	19,77%
		6. RANTAU INDAH	15	3,571	3,029	15,18%
		7. SIDO MUKTI	10	2,445	2,223	9,08%
		Total:	50	11,712	10,262	12,38%
3.	GERAGAI	1. KOTA BARU	6	1,542	1,356	12,06%
		2. LAGAN TENGAH	11	2,853	2,373	16,82%
		3. LAGAN ULU	8	1,919	1,561	18,66%
		4. PANDAN JAYA	17	4,189	3,844	8,24%
		5. PANDAN LAGAN	7	1,800	1,542	14,33%
		6. PANDAN MAKMUR	6	1,444	1,250	13,43%
		7. PANDAN SEJAHTERA	6	1,566	1,342	14,3%
		8. RANTAU KARYA	3	840	728	15,24%
		9. SUKA MAJU	10	1,936	1,875	3,15%
		Total:	74	18,089	15,871	12,26%
4.	KUALA JAMBI	1. KAMPUNG LAUT	13	3,249	2,564	21,08%
		2. KUALA LAGAN	3	769	620	19,38%
		3. MAJELIS HIDAYAH	6	1,535	1,246	18,83%
		4. MANUNGAL MAKMUR	3	407	347	14,74%
		5. TANJUNG SOLOK	14	3,277	2,659	18,86%
		6. TELUK MAJELIS	7	1,734	1,518	12,46%
		Total:	46	10,485	8,954	14,6%
5.	MENDAHARA	1. BAKTI IDAMAN	10	2,032	1,755	13,63%
		2. LAGAN ILIR	5	1,223	1,082	11,53%
		3. MENDAHARA ILIR	23	5,466	4,462	18,37%
		4. MENDAHARA TENGAH	12	2,945	2,406	18,30%
		5. MERBAU	9	2,264	1,920	15,19%
		6. PANGKAL DURI	11	2,243	1,730	22,87%
		7. PANGKAL DURI ILIR	5	1,012	841	16,90%
		8. SINAR KALIMANTAN	3	635	578	8,98%
		9. SUNGAI TAWAR	9	2,151	1,906	11,39%
		Total:	87	20,021	16,680	17,71%
6.	MENDAHARA ULU	1. BUKIT TEMPURUNG	4	714	646	9,52%
		2. MENCOLOK	5	988	823	16,7%
		3. PEMATANG RAHIM	12	2,262	1,886	16,62%
		4. SIMPANG TUAN	6	1,396	1,207	13,54%
		5. SINAR WAJO	7	1,585	1,296	18,23%
		6. SUNGAI BERAS	11	2,665	2,137	19,81%
		7. SUNGAI TOMAN	7	1,590	1,266	20,38%
		Total:	52	11,082	9,261	16,43%
7.	MUARA SABAK BARAT	1. KAMPUNG SINGKEP	9	1,853	1,608	13,22%
		2. NIBUNG PUTIH	5	1,371	1,110	19,04%

		3. PARIT CULUM I	16	3,825	3,169	17,15%
		4. PARIT CULUM II	6	1,335	1,146	14,16%
		5. RANO	9	2,057	1,712	16,77%
		6. TALANG BABAT	9	2,592	2,069	20,18%
		7. TELUK DAWAN	5	1,238	1,072	13,41%
		Total:	59	13,471	11,886	11,77%
8.	MUARA SABAK TIMUR	1. ALANG-ALANG	5	1,032	833	19,28%
		2. KOTA HARAPAN	9	1,297	1,076	17,04%
		3. KOTA RAJA	6	1,240	1,099	11,37%
		4. KUALA SIMBUR	4	696	586	15,80%
		5. LAMBUR	17	3,678	2,775	24,55%
		6. LAMBUR I	9	2,408	2,011	16,49%
		7. LAMBUR II	14	3,413	2,820	17,37%
		8. MUARA SABAK ILIR	11	2,786	2,213	20,57%
		9. MUARA SABAK ULU	12	2,848	2,158	24,23%
		10. SIAU DALAM	8	1,853	1,576	14,95%
		11. SIMBUR NAIK	18	2,918	2,526	13,43%
		12. SUNGAIULAR	3	377	312	17,24%
		Total:	116	24,546	19,985	18,58%
9.	NIPAH PANJANG	1. BUNGA TANJUNG	5	1,080	961	11,02%
		2. NIPAH PANJANG I	22	4,651	3,899	16,17%
		3. NIPAH PANJANG II	26	6,331	5,098	19,48%
		4. PEMUSIRAN	4	886	687	22,46%
		5. SIMPANG DATUK	4	871	770	11,6%
		6. SIMPANG JELITA	3	482	400	17,01%
		7. SUNGAIJERUK	5	1,021	899	11,95%
		8. SUNGAI RAYA	5	892	755	15,36%
		9. SUNGAI TERING	7	1,517	1,221	19,51%
		10. TELUK KIJING	4	829	725	12,55%
		Total:	85	18,310	15,415	15,81%
10.	RANTAU RASAU	1. BANDAR JAYA	14	3,518	2,881	18,11%
		2. BANGUN KARYA	7	1,852	1,442	22,14%
		3. HARAPAN MAKMUR	10	2,306	1,927	16,44%
		4. KARYA BAKTI	5	1,196	986	17,56%
		5. MARGA MULYA	3	733	620	15,42%
		6. PEMATANG MAYAN	4	896	720	19,64%
		7. RANTAU JAYA	10	2,327	2,029	12,81%
		8. RANTAU RASAU I	8	1,997	1,615	19,13%
		9. RANTAU RASAU II	9	2,112	1,756	16,86%
		10. SUNGAI DUSUN	1	218	198	9,17%
		11. TRIMULYA	6	1,536	1,330	13,41%
		Total:	77	18,691	15,504	17,05%
11.	SADU	1. AIR HITAM LAUT	6	1,541	1,245	19,21%
		2. LABUHAN PERING	6	1,094	877	19,84%
		3. REMAU BAKU TUO	2	480	419	12,71%
		4. SUNGAI BENUH	2	112	92	17,86%
		5. SUNGAI CEMARA	3	476	368	22,69%
		6. SUNGAI ITIK	6	1,623	1,380	14,97%
		7. SUNGAI JAMBAT	11	2,271	2,061	9,25%
		8. SUNGAI LOKAN	6	1,335	1,089	18,43%
		9. SUNGAI SAYANG	5	999	843	15,62%
		Total:	47	9,850	8,374	14,98%
		TOTAL	729	168,575	138,633	17,74%

Sumber data diambil dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/> diakses April 2023 dan Kantor KPU Muara Sabak Timur

Diseluruh Provinsi Jambi Tanjung Jabung Timur tergolong tingkat partisipasi

politik yang tinggi¹⁰, dapat dilihat datanya sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Persentase Rekapitulasi Suara Pada Pilkada 2020
di Tanjung Jabung Timur

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Hasil Perolehan Suara
1	Abdul Rasid dan H. Mustakim	PDIP, NASDEM, PBB	29.379 (23,2%)
2	Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah	Independen	97.394 (76,8%)

Tingginya partisipasi politik yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia dan infrastruktur pembangunan khususnya jalan utama yang menghubungkan 4 kecamatan yang keadaannya sangat rusak. Hal tersebut menyebabkan terdapat ketimpangan dengan tingginya partisipasi politik di kabupaten tersebut. Data rendahnya Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini¹¹ :

Tabel 3
Data Indeks Pembangunan Manusia di Tanjab Timur

Komponen IPM	IPM		
	2019	2020	2023
Angka harapan hidup	66,08	66,23	66,34
Harapan lama sekolah	12,01	12,16	12,17
Rata-rata lama sekolah	6,35	6,70	6,92
Pengeluaran perkapita (ribu rupiah)	9192,00	9026,00	9163,00
IPM	63,92	64,43	64,91

Dalam penelitian terdahulu terdapat upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dan di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta

¹⁰ Sumber data diambil dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi> diakses Mei 2023

¹¹ Sumber data diambil dari <https://tanjabtimkab.bps.go.id/indicator/26/47/1/ipm.html> diakses Mei 2023

menunjukkan orsinalitas dari penelitian.¹² Pada bagian ini peneliti mencamtumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yunus yang berjudul “Politik Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang akan mendeskripsikan data-data empiris yang memuat gejala sosial dan informanya sebanyak enam orang pegawai. Teknik pengumpulan datanya berupa Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan lelang jabatan diperoleh bahwa pergantian pejabat struktural secara besar-besaran yang diintervensi oleh politik, Komersialisasi jabatan dalam penempatan jabatan yang dilakukan oleh tim sukses Bupati terhadap oknum-oknum pejabat, adanya politik transaksional atau politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran Pemerintah Daerah, dan marginalisasi Baperjakat dalam mekanisme penempatan jabatan di jajaran Pemerintah Daerah justru kebalikan dari mekanisme yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Lalu yang kedua Kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi politisasi birokrasi yang terjadi di Pemerintah Daerah, seperti Kepentingan kekuasaan atau politik kepala daerah, hubungan *patron client* antara Kepala Daerah dan para

¹² https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/882-Full_Text.pdf

birokratnya sebagai bentuk loyalitas birokrat terhadap pemimpinnya dengan imbalan jabatan yang lebih tinggi atau sekedar mengamankan posisi birokrat tersebut dalam jajaran Pemerintah, nuansa nepotisme yang masih kental terasa dalam penempatan jabatan-jabatan dalam lingkungan Pemda, dan menguatnya Neo Feodalisme atau pewarisan kekuasaan yang dilakukan didasarkan untuk memperluas kekuasaannya untuk periode berikutnya. Lalu yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Ahclak Asmara Yasa yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa.”¹³ Penelitian ini membahas mengenai Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa. Tujuan dari penelitian ini yaitu Pertama Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada serentak di selenggarakan pada tahun 2015 khususnya di Kabupaten Gowa, Kedua untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat pemilih pemula di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Gowa, Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2015. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Penelitian ini kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Dalam Fenomenologi pokok permasalahan, maka penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik.

¹³ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9095/1/Ahclak%20Asmara%20Yasa.pdf>

Hasil penelitian menggambarkan pertama, bahwa masyarakat pemilih pemula yang ada dikelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah, namun hanya pada tahapan ikut serta dalam memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung, Kedua bahwa partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dikelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) yang dapat dilihat dari tingginya masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan pilkada, dengan harapan sosok pemimpin yang terpilih nantinya dapat membawa daerah mereka lebih baik lagi. Kurangnya pemahaman politik serta proses penyampaian informasi mengenai politik merupakan salah satu faktor penghambat bagi masyarakat pemilih pemula. Serta minimnya Pendidikan politik yang diberikan pemerintah yang bersangkutan terhadap pemilih pemula agar dapat melibatkan pemilih pemula secara efektif yang akan memperkuat dan mempermudah partai politik dan penyelenggara pemilu pada langkah tindak selanjutnya. Dan yang terakhir penelitian Dwi Fitriani yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Pada Pemilu 2019”¹⁴.

Penelitian ini mengenai Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan ilir pada Pemilu tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat di kecamatan payaraman serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi politik masyarakat kecamatan payaraman pada pemilu tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan

¹⁴ <http://repository.radenfatah.ac.id/9941/1/DWI%20FITRIANI.pdf>

menggunakan konsep teori dari buku Miriam Budiardjo mengenai kesadaran dan keyakinan dalam partisipasi politik. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara langsung terhadap masyarakat kecamatan payaraman. Data yang didapat direduksi dan diverifikasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi politik masyarakat kecamatan payaraman tinggi ini dibuktikan dengan adanya hasil rekapitulasi dari KPUD Ogan ilir bahwa partisipasi politik di kecamatan payaraman pada pemilu tahun 2019 dengan kategori DPRD Kabupten 88.8%, DPD RI 88.76%, DPR RI 88.76%, DPRD Sumsel 88.8% dan PPWP 82.4%. Selain itu, terdapat faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Payaraman. Faktor yang mendukung partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Payaraman yaitu kesadaran masyarakat terhadap politik dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat di kecamatan karena adanya keterbatasan pengenalan masyarakat terhadap calon yang ada serta lebar nya kertas suara sehingga menimbulkan rasa kebingungan dalam menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar.¹⁵

Berdasarkan gambaran di atas maka peneliti tertarik untuk lebih jauh lagi meneliti tentang adanya dugaan politisasi birokrasi dengan judul penelitian “Analisis Dampak Politisasi Birokrasi Pada Tingkat Partisipasi Politik Di Tanjung Jabung Timur Pada Pilkada 2020”.

¹⁵ <http://repository.radenfatah.ac.id/9941/>

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitiannya pada fenomena tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan umum tahun 2020. Untuk itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan masyarakat Tanjung Jabung Timur tetap menggunakan hak pilihnya secara optimal disaat kurangnya infrastruktur yang memadai?
2. Faktor apa yang paling berpengaruh pada tingkat partisipasi politik di Tanjung Jabung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Tanjung Jabung Timur tetap menggunakan hak pilihnya secara optimal disaat kurangnya infrastruktur yang memadai
2. Untuk menjelaskan tentang faktor yang paling berpengaruh dalam politisasi birokrasi yang terjadi di Tanjung Jabung Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa di dapatkan dari hasil penelitian ini yang kiranya akan dapat membantu peneliti maupun unsur yang terkait di dalamnya, ialah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan, terutama bidang ilmu politik, untuk melihat faktor penyebab yang paling berpengaruh dalam politisasi birokrasi yang terjadi di Tanjung Jabung Timur

b. Secara Praktis :

Manfaat praktis penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan wawasan serta untuk memenuhi tugas akademik sebagai syarat dan kewajiban untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

1.5 Landasan Teoritis

1. Teori Politisasi Birokrasi

Kajian paradigma politik birokrasi dalam pandangan Graham Allison yang diulas oleh Frederickson dalam bukunya *The Public Administration Theory Primer* mengemukakan secara umum teori politik birokrasi adalah teori yang menjelaskan peran administrasi dan birokrasi dalam proses pembuatan kebijakan publik sekaligus menolak pandangan dikotomi administrasi dan politik. Kemunculan Politisasi birokrasi berasumsi dari fakta empiris peran dan perilaku Politisasi dalam birokrasi. ¹⁶Teori ini dikembangkan dengan suatu sikap sepaham dengan pandangan bahwa administrasi tidak hanya teknis dan aktivitas bebas nilai dan terpisah dari politik, dengan makna lain sejalan dengan pandangan D. Waldo yang mengatakan bahwa *administration is politic*.

Paradigma Politisasi birokrasi menjelaskan bahwa tindakan-tindakan pemerintah merupakan hasil bargaining tawar menawar dan kompromi diantara berbagai elemen organisasi dalam pemerintah. Umumnya politisasi itu dimaknai sebagai pelayanan publik yang lebih memperhatikan politik. Lebih-lebih para politisi menghabiskan waktu dan energi untuk memastikan para pelayan publik akan sesuai

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 367

dengan kelompok dan preferensi kebijakannya. Para politisi membuat dukungan politik untuk posisi administrasi sehingga kontrol politik telah jauh menjangkau ke area birokrasi.¹⁷ Hal ini bisa dimaknai bahwa birokrasi mempunyai kekuasaan politik. Posisi birokrasi kuat secara politik karena memiliki sumber-sumber kekuasaan yang lengkap. Menurut Guys Peters diungkap ada empat sumber kekuasaan penting yang dimiliki birokrasi yaitu personifikasi negara, penguasaan informasi dan keahlian, decision making, dukungan politik, status sosial yang tinggi dan kelembagaan permanen dan stabil. Paradigma politik Allison ini merupakan model III, dua model sebelumnya menjelaskan keputusan merupakan produk aktor tunggal dan model kedua aktor berproses dalam pembuatan kebijakan melalui *Standard Operating System* (SOP). Politik birokrasi Allison dibangun melalui empat proposisi, yaitu : (1) pemerintah/eksekutif terdiri atas sejumlah organisasi dan individu yang divergen memiliki tujuan dan agenda masing masing (2) tidak ada aktor pemerintah yang dominan dan mampu bertindak sendiri/dapat bertindak unilateral (3) Keputusan final adalah sebuah hasil produk atau political resultant atau hasil bergaining dan kompromi dari proses politik (4) terdapat perbedaan antara pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya atau penerima keputusan.

Birokrasi publik dalam paradigma ini dikategorikan sebagai salah satu aktor yang memiliki posisi, memiliki pengaruh, dan memiliki cara bermain di dalam proses politik formulasi kebijakan. Watak birokrasi politik tetap eksis, kenyataan yang bisa diungkap adalah pada domain formulasi kebijakan dimana birokrasi menjadi kekuatan bergaining dengan legislatif, misalnya kompromi dan lobi anggaran. Salah satu

¹⁷ <https://core.ac.uk/download/pdf/228787496.pdf>

implikasi dari politik birokrasi seperti pada pendapat Allison Model adalah terlalu terbatas dalam cakupan dari pada terlalu ambisius. Secara khusus, kerangka Allison meninggalkan isu-isu organisasi yang penting, seperti sebagian besar dari kerangka yang berusaha mensintesis. hampir secara eksklusif berfokus pada merek yang eksekutif. Ada dua dimensi organisasi kunci teori politik birokrasi¹⁸ :

a. Berhubungan dengan perilaku.

Tujuan utama adalah untuk menjelaskan mengapa birokrat dan birokrasi melakukan apa yang mereka lakukan. Anggapan umum adalah bahwa birokrasi mengejar misi publik yang penting membuat kebijakan banyak, namun hanya memiliki pedoman jelas dari undang-undang. Jika lembaga-lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk tujuan lembaga-lembaga publik, hanya sebagian menjelaskan apa yang birokrasi lakukan dan mengapa mereka melakukannya.

b. Berkaitan dengan struktur kelembagaan dan distribusi kekuasaan.

Tujuan utama di sini adalah untuk memahami bagaimana jalur resmi birokrasi kewenangannya berhubungan ke lembaga lain dan program-program kebijakan ditempatkan dalam yurisdiksinya semua bergabung untuk menentukan pengaruh politik relatif berbagai aktor politik. Penjelasan untuk perilaku politik birokrasi dan birokrat memiliki akar yang kuat dalam literatur teori organisasi. Misalnya :

- 1). Robert Merton (1957) menyatakan bahwa lembaga disusun sebagai birokrasi klasik membentuk kepribadian orang-orang yang bekerja untuk mereka. Sebuah lingkungan birokrasi Merton berpendapat agar sesuai dengan pola-

¹⁸ <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/download/229/212>

pola perilaku yang diharapkan untuk mengikuti aturan menjadi metodis dan rinci.

- 2). William Whyte Jr, menjelaskan tema yang sama dalam bukunya Organisasi kerja Thr. Mach (1956). Penelitian ini mengadopsi tujuan dari organisasi yang mereka kerjakan sebagai milik mereka, menggolongkan kepribadian mereka kedalam lingkungan organisasi yang lebih besar. Wilson mengajukan sebuah pertanyaan yang sama dengan Allison, meskipun itu lebih fokus ke masalah administrasi. Bertanya mengapa pemerintah melakukan apa yang mereka lakukan, Wilson bertanya mengapa birokrasi melakukan apa yang mereka lakukan. Wilson berpendapat bahwa birokrat memiliki kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan mereka, dan faktor bagaimana kebijakan yang dilakukan. Sebelum kontribusi Wilson, banyak sarjana telah menegaskan bahwa kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, pada dasarnya membuat birokrat menjadi pembuat kebijakan, dan birokrasi menjadi aktor politik.¹⁹

Wilson menyimpulkan bahwa birokrasi yang sukses adalah di mana eksekutif telah menjalankan dengan baik, mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dicapai untuk memenuhi misi, wewenang didistribusikan dalam organisasi sesuai dengan tugas-tugas, dan memberikan bawahan (terutama operator) dengan cukup otonomi untuk mencapai tugas di tangan, urutan cukup tinggi mengingat lingkungan kompleks lembaga-lembaga publik. Argumen Wilson menunjukkan bahwa lembaga diberikan tujuan yang jelas dan tingkat otonomi yang lebih tinggi mungkin berhasil dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, seperti Wilson

¹⁹ Vika Trisna, Fatmariza. *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Partisipasi Politik Mahasiswa pada Pemilu Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2018- 2019 (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang)*, Journal of Civic Education Vol 2. No. 3, Universitas Negeri Padang.

mengakui, sulit untuk melihat bagaimana tujuan yang jelas dapat secara rutin diproduksi sebagai produk akhir dari proses demokrasi, Jika administrasi pemerintahan diberikan tingkat otonomi yang lebih besar, dan jika lebih jelas tujuan seni atau datang dari demokrasi lembaga pemerintahan, kemungkinan hasilnya adalah pengalihan meningkatnya jumlah tenaga kebijakan ke birokrasi. Dalam seruannya untuk misi lebih jelas dan sentralisasi IESS di birokrasi publik. Argumen Wilson akhirnya preskriptif. Reorganisasi melalui deregulasi. Namun ternyata menjadi perpanjangan dari politik birokrasi daripada cara untuk menyalurkannya menuju tujuan universal diinginkan. Organisasi membantu menentukan tidak hanya bagaimana birokrasi dan birokrat berperilaku, tetapi juga bagaimana kekuasaan dan pengaruh yang didistribusikan di antara berbagai aktor dalam sistem politik.²⁰

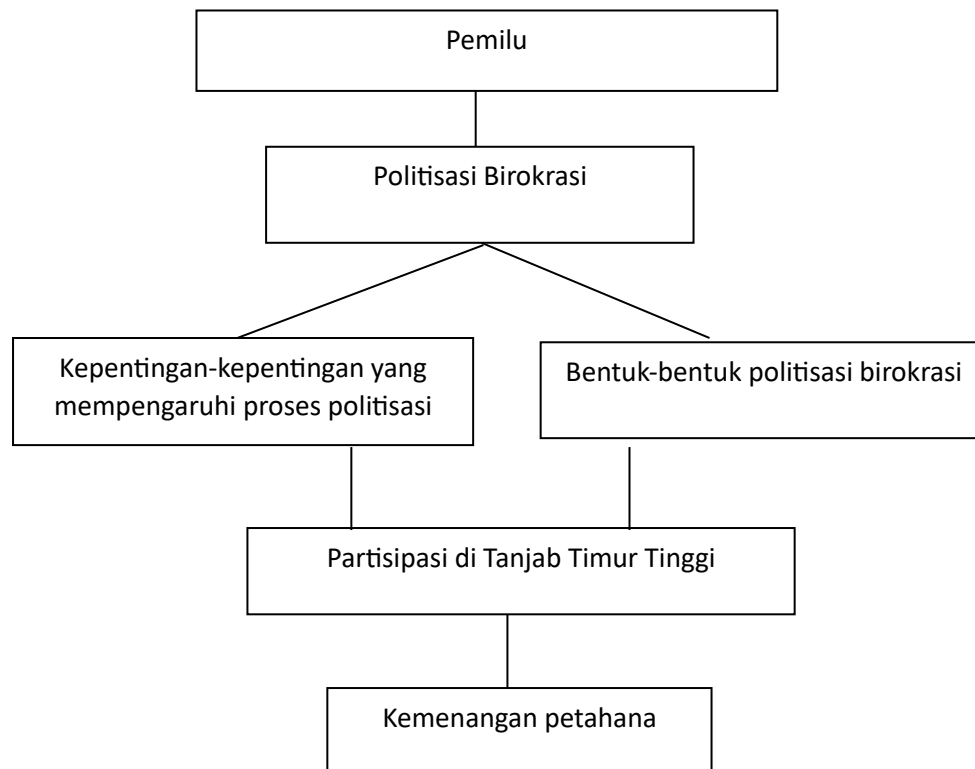
Dalam penjelasan Teori Kontrol Birokrasi menurut pemahaman George Frederickson, "kekuasaan politik untuk birokrasi adalah langkah kontrol dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yang dalam praktek birokrasi membatasi tindakan politik hanya dalam Kegiatan administrasi pemerintahan saja". Kehadiran politik dalam birokrasi memperlihatkan bahwa seorang administrator dalam perumusan kebijakan pemerintah mengedepankan arah pemikiran politik yang komprehensif.

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena menggambarkan alur pemikiran peneliti mengenai focus dalam penelitian.

²⁰ Thoha, Miftah, 2003. *Birokrasi dan politik di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal 23

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam politisasi birokrasi yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu Negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih.

Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu. Pemilu di tanjung jabung timur pemilihan umum lokal yang diselenggarakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Indonesia. Pilkada ini diselenggarakan dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2021-2024. Bupati dan wakil bupati petahana berpeluang mencalonkan diri kembali karena masing-masing baru menjabat selama satu periode. Partai politik yang akan mengajukan pasangan calon (paslon) harus memiliki paling sedikit 6 kursi di DPRD Tanjab Timur. Hasil Pemilu 2019 menunjukkan dari total 7 partai politik pemilik kursi di DPRD Tanjab Timur hanya Partai Amanat Nasional (17 kursi) yang dapat mencalonkan tanpa harus berkoalisi.

Hasil pemilihan umum legislatif 2019 terdapat 7 Partai Politik dengan jumlah 30 Kursi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Politisasi birokrasi di Indonesia bukanlah hal baru, melainkan sebuah proses yang berlangsung semenjak pemilihan umum pertama kali di Indonesia tahun 1955. Politisasi Birokrasi dilakukan oleh rezim Orde Lama, Orde baru dan sampai Rezim Reformasi. Dan kini, politisasi birokrasi berlanjut pada pemilihan kepala daerah di tanjung jabung timur pada tahun 2020 lalu dengan memanfaatkan birokrasi sebagai alat atau mesin politik memuluskan langkah politik calon petahana, birokrasi bersifat netral dan bebas dari intervensi politik, walaupun dalam kepemimpinannya birokrasi dibawah kendali elite politik yang dipilih langsung melalui mekanisme politik. Dalam suksesi kekuasaan lima tahunan birokrasi dapat digunakan sebagai mesin politik oleh kepala daerah petahana, dan sebaliknya aparatur sipil negara dapat bersikap bebas menentukan pilihan politik. Sikap netralitas inilah yang menjadi titik tekan dalam setiap hajatan demokrasi lokal, tetapi netralitas birokrasi harus tercoreng dengan sikap politik birokrasi yang mendukung calon kepala daerah dan terlibat aktif dalam kerja-kerja pemenangan kandidat.

Praktik politisasi birokrasi tidak sekedar memanfaatkan fasilitas pemerintah, melainkan menggunakan kekuasaan dan kewenangan untuk menggunakan anggaran publik dan program pemerintah untuk kepentingan politik. Hal ini dilakukan oleh birokrasi yang secara te Politisasi birokrasi menjadi perdebatan yang tidak pernah habisnya selama proses politik perebutan kekuasaan, keterlibatan birokrasi dalam urusan politik dan bagaimana susahny menegakan netralitas birokrasi menjadi realitas yang ditemui di setiap kontestasi. Seiring

perkembangan demokrasi lokal membuat birokrasi tidak mudah lepas dari intervensi politik dimana birokrasi sebagai ujung tombak penyelenggara pelayanan menjadi tidak efektif. Pilkada langsung tidak luput dari praktek politisasi birokrasi proses yang sebelumnya menonjol pada pemilihan legislatif dan pengisian kabinet di pemerintah pusat, kini bergeser ke tingkat daerah. Calon kepala daerah (petahana) menggunakan strategi ini untuk mempertahankan kekuasaan atau kembali berkuasa. Birokrasi digunakan sebagai instrumen politik untuk melakukan mobilisasi masa dan menunjang kegiatan-kegiatan politik petahana.

Birokrasi menjadi pilihan membangun kekuatan politik sebabkan birokrasi memiliki kekuasaan, kewenangan dan sistem yang berbeda dengan organisasi publik lainnya. Kekuasaan birokrasi senantiasa dimanfaatkan elite politik dalam urusan kemenangan pilkada yang mana fenomena politisasi birokrasi terjadi di tubuh pemerintahan kabupaten tanjung jabung timur yang mana elit politik selaku kepala pemerintahan di kabupaten tersebut melibatkan birokrasi (pegawai negeri) secara langsung dan terang-terangan untuk menjadi pendukung dan anggota (kader) organisasi peserta pemilu guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik di parlemen dan eksekutif. Dan intervensi politik yang dilakukan penguasa (petahana) ke dalam birokrasi guna melibatkan ASN ke dalam urusan pilkada dengan tujuan mendapatkan dukungan politik dan mempertahankan kekuasaan. Dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai kepala daerah membuat petahana dengan mudah mempengaruhi dan menekan birokrasi untuk memuluskan kepentingan politiknya. Praktik birokrasi dapat dilihat semanjak petahana mencalonkan diri kembali sampai pada tahapan akhir pilkada yang mana para

kepala pemerintahan di tingkat desa di tekan untuk mendukung kembali petahana selaku pimpinan tertinggi pemerintahan di kabupaten untuk memenangkan kembali dirinya, kepentingan politik birokrasi yang terjebak untuk mendukung salah satu calon dengan harapan untuk mendapatkan jabatan. Akhirnya para pejabat politik yang terpilih harus mendudukkan orang-orang yang mendukungnya dan juga Keinginan Untuk Memperkuat Kekuasaan Politikas menunjukkan bahwa kekuasaan ini digunakan untuk menyusun, menjaga, dan memperkuat pasukan atau jajarannya yang ada di bawahnya agar pemerintahan dapat berjalan seperti yang dikehendaknya, bentuk bentuk politisasi yang ada di tanjung jabung timur Politik Balas Budi dimana elite birokrasi yang telah diangkat sebagai pimpinan merasa bertanggung jawab dan membalas kebaikan yang dilakukan petahana karena telah memberikan jabatan yang diberikan kepadanya Hubungan atasan dan bawahan membentuk sikap loyalitas terhadap petahana, dimana proses pengangkatan kadis tidak adanya transaksional dan mengedepankan profesionalisme. Dengan itu, mereka yang diangkat sebagai pimpinan SKPD merasa beban budi terhadap jabatan yang diemban.

Sebagai bentuk ucapan terima kasih, dukungan terhadap petahana di pemilihan umum menjadi tanggung jawab dengan segala resiko. Bentuk pengorbanan baik itu materi, dan waktu ditujukan kepada kerja-kerja politik untuk meraih kemenangan petahana. Adanya politisasi birokrasi yang ada pada tubuh pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tingkat pemerintahan di tingkat desa maupun struktural kepala di tingkat Kabupaten. Sehingga membuat partisipasi politik di Tanjung Jabung Timur tinggi terbukti pada pemilihan Pilkada

tahun 2020 lalu di Tanjung Jabung Timur Pada Pemilu tahun 2019, tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat yaitu sebesar 84% dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 168.575 jiwa dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 141.929 jiwa. Sehingga membuat kemenangan petahana menang mutlak dari lawan kontestasinya sebanyak 75,45% hasil dari 615 TPS. Pasangan petahana dengan nomor urut 02 Romi Hariyanto dan Robby Nahliansyah itu mampu unggul 76,4 persen atau total 72.819 suara, sedangkan paslon 01, Abdul Rasyid dan Mustakim yang merupakan pesaingnya, hanya 23,6 persen dengan total 22.552 suara. Sehingga pasangan petahana menduduki kembali posisi kepala daerah maupun kepala pemerintah untuk periode yang kedua.

1.7 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Lokasi ini dipilih secara sengaja dengan pertimbangan dikarenakan Kabupaten Tanjung Timur yang tingkat partisipasi politiknya tergolong tinggi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah kegiatan dalam melakukan pengamatan terhadap individu-individu dengan cara berdialog secara langsung guna memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang hal-hal yang sedang diteliti. Ciri khusus dari penelitian kualitatif memiliki pandangan subjektif untuk memahami sebuah permasalahan yang ingin dan sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari

berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.²¹ Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya (orang, partisipasi, atau responden yang ditanyai) sangat beragam. Kondisi ini memang disengaja oleh periset karena tujuannya untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset eksploratori. Menurut David Williams dalam buku Andi Prastowo mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.

²¹ Fajar Junaedi, *Komunikasi Politik Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*, (Yogyakarta : Buku Litera Yogyakarta, 2019) Hal 258.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Jenis penelitian kualitatif bisa bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal atau sumber pustaka lainnya, dengan demikian akan memudahkan peneliti mengerti isi dan tujuan di dalam penelitiannya.²²

3. Sumber Data

Untuk mengetahui darimana data di peroleh, maka perlu ditentukan sumber data penelitian sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian ini. Maka sumber data yang diperoleh dikelompokkan menjadi :

1) Data primer

Data primer data yang diperoleh secara langsung lewat sumber utama dari pihak- pihak yang terkait di dalam permasalahan penelitian dan disesuaikan dengan kriteria topik permasalahan oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berperan pendukung dan pelengkap. Data sekunder bisa diperoleh dari buku, skripsi, tesis, koran atau data elektronik lainnya yang tentu saja berkaitan dengan topik penelitian yang

²² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003) Hal. 5

diangkat.²³ Pada skripsi ini untuk menunjang data, penulis mengambil data dari website pemilu KPU 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data biasanya akan dipadukan dengan teori yang didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan peneliti. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan sehingga kemudian dapat dikonstruksikan menjadi analisa.

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dengan informan sesuai topik penelitian. Lewat wawancara, penulis dapat menggali jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada melalui pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan terkait. Dalam penelitian ini informan yang menjadi narasumber untuk menunjang skripsi ini adalah :

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Alasan	Instansi/ oganisai
1.	LSM	2	Sebagai pengawas jalannya pemerintahan	1. HIWADA 2. Antara
2.	Pengamat Politik	2	Sebagai pengamat jalannya proses pemerintahan	1. Muslimin Tanja 2. Yudi Hariyanto EY
3.	Partai Politik	3	Sebagai penghimpun dan penampung aspirasi masyarakat	1. Nasdem 2. PKS 3. PPP
4.	Instansi Pemerintahan	3	Sebagai pelaksana pemerintah	1. Dinas PU 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Sosial
5.	Organisasi Masyarakat	3	Sebagai pemberi tanggapan terhadap pemerintahan	1. Karang Taruna 2. Pemuda Pancasila 3. KNPI

²³ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), Hal.12

Hasil penelitian menunjukkan sebagian informan merasa hak pilihnya dipengaruhi karena adanya intervensi yang dilakukan oleh SKPD untuk menyukseskan salah satu pasangan calon bupati pada pemilu 2019. Rasa keterpaksaan dan adanya pengiringan opini untuk menyukseskan salah satu pasangan calon bupati pada pemilu 2019 dirasakan oleh informan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Organisasi Masyarakat yang berprofesi sebagai ketua salah satu organisasi masyarakat yang ada di Tanjung Jabung Timur bahwa sebagian dari mereka menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh salah satu instansi pemerintah di tingkat bawah yang mengarahkan untuk memilih salah satu calon bupati mereka dengan sistem politik yang ada, dikarenakan intervensi terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Disamping itu terdapat juga informan yang lain yang berinisial M yang berprofesi sebagai Pengamat Politik yang merasa bahwa adanya indikasi penyelewengan aturan untuk memenangkan salah satu pasangan calon bupati pada pemilihan umum 2019 lalu. Sedangkan pengamat lain yang berinisial A mencurigai adanya penyimpangan kewenangan salah satu kepala dinas instansi terhadap bawahan jajaran instansi untuk memilih salah satu pasangan calon pemilihan bupati. Hal tersebut merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.²⁴ Sedangkan menurut tanggapan salah

²⁴ Tareh Rasyid. *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta. 2017) Hal. 96

satu kepala bidang instansi di salah satu dinas tidak membenarkan adanya kecurangan pada pemilihan bupati dan calon bupati di tahun 2019 yang lalu, menurutnya pada pemilihan bupati tidak ada intervensi ataupun penyimpangan wewenang yang di kemukakan oleh informan lainnya adanya kecurangan dan penyelewengan wewenang hal ini merujuk pada temuan sebelumnya yaitu terkait tingginya partisipasi politik yang timbul pada masyarakat kabupaten tanjung jabung timur itu terjadi pada pemilihan, kepala daerah, maupun legislatif, juga dikarenakan intervensi dari struktur SKPD dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi seperti yang dikatakan oleh Anggota Partai Politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berinisial Y.

Dengan kata lain, masyarakat sudah di bohongin oleh kinerja *incumbent* semata mata hanya untuk memenangkan nafsu politik di pemilihan umum yang akan akan di pertarungkan kembali pada pemilihan umum 2019 silam, struktur pemerintahan daerah kabupaten di tingkat desa mengarahkan untuk memilih suatu pasangan calon bupati yang ditunjukan kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon.

Teknik pengumpulan studi literatur dan dokumentasi adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan menelusuri sumber tulisan yang telah ada sebelumnya, entah dalam bentuk karya buku, jurnal skripsi, tesis dan yang lainya yang sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.²⁵

5. Teknik Analisis Data

²⁵ Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Hal. 104

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran dari masyarakat tertentu terhadap fenomena politik yang terjadi. Secara sederhana analisa data deskriptif dapat kita pahami sebagai sebuah penelitian yang dapat mengeksplorasi dan mengklasifikasikan suatu fenomena sosial, dengan cara mendeskripsikan variabel yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.²⁶

²⁶ Syamsir Salam dan Jaenal Aripin, *Metodologi Penelitian Sosia l* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), Hal. 14

